1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

1. Perkembangan Inflasi Daerah & Harga Kebutuhan Pokok

A. Perkembangan Inflasi Juli 2026

Pada Juli 2026, Kota Bandung mengalami deflasi sebesar 0,06% (mtm). Tingkat deflasi Provinsi Jawa Barat sebesar 0,05% (mtm) dan Nasional mengalami deflasi 0,14% (mtm). Dari sisi tahunan, inflasi Kota
Bandung tercatat sebesar 2,79% (yoy) dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 111,14. Capaian ini lebih tinggi dibanding inflasi Provinsi Jawa Barat (2,72% yoy) namun lebih rendah dari inflasi Nasional (2,88% yoy). Inflasi Tahun Kalender Kota Bandung tercatat sebesar 1,53% (ytd).

Andil Inflasi (mtm)
Bensin (0,12)
Taman kanak-kanak (0,02)
Pemeliharaan/service (0,02)
Andil Deflasi (mtm)
Cabai rawit (-0,08)
Cabai merah (-0,06)
Emas perhiasan (-0,06)
Daging ayam ras (-0,05)
Telur Ayam Ras (-0,05)
Bawang merah (-0,04)

B. Perkembangan Inflasi Agustus 2026

Pada Agustus 2026, Kota Bandung kembali mengalami inflasi sebesar 0,32% (mtm), meningkat dibandingkan bulan sebelumnya. Tingkat inflasi Provinsi Jawa Barat (0,21% mtm) dan Nasional (0,21%mtm). Dari sisi tahunan, inflasi Kota Bandung tercatat sebesar 3,27% (yoy) dengan IHK sebesar 111,50, lebih tinggi dari nilai inflasi Provinsi Jawa Barat (3,13% yoy) dan Nasional (3,19% yoy). Inflasi Tahun Kalender tercatat sebesar 1,86% (ytd).
Andil Inflasi (mtm)
Daging ayam ras (0,15)
Sigaret putih mesin/SPM (0,07)
Nasi dengan lauk (0,05)
Emas perhiasan (0,03)
Cabai merah (0,03)
Jagung manis (0,03)
Beras (0,02)
Andil Deflasi (mtm)
Bawang merah (-0,04)
Bawang putih (-0,04)
Bensin (-0,04)

C. Perkembangan Inflasi September 2026

Pada September 2026, Kota Bandung mengalami inflasi sebesar 0,23% (mtm), menurun dibandingkan inflasi bulan sebelumnya. Tingkat inflasi Provinsi Jawa Barat (0,23% mtm) dan Nasional (0,30% mtm). Dari sisi tahunan, inflasi Kota Bandung tercatat sebesar 3,35% (yoy)

dengan IHK sebesar 111,76 (lebih tinggi dari Jabar 3,16% dan Nasional 3,28%). Inflasi Tahun Kalender tercatat sebesar 2,10% (ytd).
Andil Inflasi (mtm)
Beras (0,11)
Cabai rawit (0,08)
Daging ayam ras (0,03)
Telur ayam ras (0,03)
Bensin & Nasi dengan lauk (0,01)
Andil Deflasi (mtm)
Jeruk (-0,05)
Bawang merah (-0,02)
Ketimun (-0,01)
Bawang putih (-0,01)

Tantangan yang Perlu Diantisipasi
1. Fluktuasi pasokan pangan strategis dan komoditas hortikultura (sayuran, cabai, bawang) menjelang dan selama peralihan musim penghujan, mengingat Kota Bandung sangat bergantung pada pasokan luar daerah (sekitar 94,07% dari luar Kota Bandung).
2. Dampak tekanan permintaan (demand shock) pada rantai pasok komoditas daging ayam ras dan telur ayam ras sebagai efek multiplier dari persiapan dan pelaksanaan program prioritas nasional (Makan Bergizi Gratis).

3. Potensi kenaikan permintaan (demand pull inflation) menjelang periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal 2026 dan Tahun Baru 2027.

2. Identifikasi Permasalahan Pengendalian Inflasi di Daerah
Juli 2026: Kota Bandung mengalami deflasi yang disebabkan oleh penurunan harga beberapa komoditas pangan seperti cabai rawit, cabai merah, daging ayam ras, dan telur ayam ras. Namun, tren ini harus diwaspadai karena beberapa komoditas inti (core inflation) dan pendidikan seperti taman kanak-kanak dan sekolah dasar mulai menunjukkan kenaikan harga seiring dimulainya tahun ajaran baru.
Agustus 2026: Tekanan inflasi meningkat didorong oleh kelompok makanan, minuman dan tembakau. Komoditas daging ayam ras menjadi penyumbang utama inflasi, diikuti oleh sigaret putih mesin dan nasi dengan lauk. Kenaikan harga emas perhiasan juga terus memberikan andil yang cukup besar secara y-on-y.

September 2026: Inflasi terus berlanjut didorong oleh kenaikan harga beras yang menjadi kontributor utama, disusul cabai rawit, daging ayam ras, dan telur ayam ras. Adanya anomali cuaca yang mempengaruhi sentra produksi menjadi ancaman serius terhadap kelancaran distribusi komoditas yang daya simpannya pendek (seperti cabai dan bawang) ke wilayah Kota Bandung.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

2. Identifikasi Permasalahan Pengendalian Inflasi di Daerah
Juli 2026: Kota Bandung mengalami deflasi yang disebabkan oleh penurunan harga beberapa komoditas pangan seperti cabai rawit, cabai merah, daging ayam ras, dan telur ayam ras.

Namun, tren ini harus diwaspadai karena beberapa komoditas inti (core inflation) dan pendidikan seperti taman kanak-kanak dan sekolah dasar mulai menunjukkan kenaikan harga seiring dimulainya tahun ajaran baru.
Agustus 2026: Tekanan inflasi meningkat didorong oleh kelompok makanan, minuman dan tembakau. Komoditas daging ayam ras menjadi penyumbang utama inflasi, diikuti oleh sigaret putih mesin dan nasi dengan lauk. Kenaikan harga emas perhiasan juga terus memberikan andil yang cukup besar secara y-on-y.

September 2026: Inflasi terus berlanjut didorong oleh kenaikan harga beras yang menjadi kontributor utama, disusul cabai rawit, daging ayam ras, dan telur ayam ras. Adanya anomali cuaca yang mempengaruhi sentra produksi menjadi ancaman serius terhadap kelancaran distribusi komoditas yang daya simpannya pendek (seperti cabai dan bawang) ke wilayah Kota Bandung.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Pelaksanaan Kebijakan Pengendalian Inflasi
1. Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Bandung melakukan Pemantauan Harga Harian dan Stok Barang Penting pada Pasar-pasar yang ada dan dilaporkan melalui: Aplikasi SP2KP Kementerian Perdagangan yang dilaporkan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung. Aplikasi SILINDA Provinsi Jawa Barat yang terintegrasi dengan Website ARIMBI Kota Bandung yang dilaporkan oleh Bagian Perekonomian Setda Kota Bandung.

2. Dinas Perdagangan dan Perindustrian melaksanakan Bazar Murah Utama/Operasi Pasar Murah secara rutin, terutama untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat di tingkat kewilayahan.
3. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) melaksanakan Gerakan Pangan Murah (GPM)
untuk menjual komoditas pangan pokok (beras, minyak, gula, telur, sayuran dan buah-buahan) dengan harga di bawah pasar, bekerja sama dengan Bulog, distributor, serta gabungan kelompok tani (gapoktan).
4. Menjaga keamanan pangan dengan menyediakan car food safety oleh DKPP Kota Bandung untuk memastikan pangan segar (daging, sayur) yang beredar di pasar aman dikonsumsi (bebas penyakit), yang secara tidak langsung juga berpengaruh pada stabilitas pasokan harian.
5. Dinas Kesehatan Kota Bandung melaksanakan pengawasan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk memastikan pelaksanaan program berjalan lancar. Dinas Pendidikan mengawasi
distribusi di sekolah, sementara Dinas Kesehatan mengawasi standar gizi dan higiene melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
6. Berpartisipasi aktif dalam Focus Group Discussion (FGD) evaluasi dampak ekonomi dan perubahan iklim di tingkat nasional (Jakarta) yang diselenggarakan oleh Bappenas, BRIN, dan LPEM UI, guna sinkronisasi kebijakan mitigasi rantai pasok.
7. Memfasilitasi kebijakan administrasi daerah, termasuk penerbitan Surat Edaran dan Nota Dinas untuk mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 secara komprehensif di wilayah Kota Bandung.

Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

4.

1. Koordinasi secara rutin dengan stakeholder terkait untuk perumusan kebijakan mengenai langkahlangkah pengendalian inflasi yang perlu diperkuat.
2. Secara umum, berdasarkan Analisis Proyeksi Neraca Pangan, status ketahanan pangan Kota Bandung pada Triwulan III berada pada kondisi 'AMAN' dan 'SURPLUS'. Sebagai contoh, pada bulan Agustus 2026, ketersediaan beras mencapai 54.383 ton dengan kebutuhan 24.856 ton (surplus 29.527 ton). Daging ayam ras juga surplus sebesar 4.206 ton.
3. Walaupun status makro menunjukkan surplus, dinamika di lapangan menunjukkan bahwa komoditas berumur simpan pendek (hortikultura) membutuhkan intervensi logistik harian. Sistem peringatan dini (early warning system) melalui pemantauan harian SP2KP dan SILINDA sangat krusial dalam memitigasi fluktuasi harga ini.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

1.Kepada Inspektorat Daerah Kota Bandung agar melaporkan perkembangan harga harian secara berkala kepada Irjen Kementerian Dalam Negeri.
2. Kepada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung agar melaksanakan:
a. Survey pemantauan harga terus dipantau sebagai early warning system perkembangan harga.
b. Pelaksanaan Operasi Pasar Bersubsidi.
c. Pelaporan pemantauan harga ke Kementerian terkait.
d. Pemantauan stok pangan pokok strategis masyarakat di tingkat agen, distributor dan pasar terutama menjelang HBKN Nataru.

3. Kepada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung:
a. Agar senantiasa memantau ketersediaan stok kebutuhan pangan dan hortikultura (khususnya komoditas daya simpan pendek seperti cabai dan bawang).
b. Melaksanakan Gelar Pangan Murah (GPM) di setiap Kecamatan secara merata.
c. Memanfaatkan lahan tidur untuk menambah jumlah kelompok berkebun Buruan SAE sebagai sumber penyangga pangan rumah tangga warga.
4. Kepada Anggota TPID Kota Bandung agar melaksanakan Sidak ke pasar kosambi, sederhana,
kiaracondong dan pasar ritel modern untuk memantau kebutuhan pangan pokok strategis masyarakat guna memastikan ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga riil.
5. Kepada Seluruh Perangkat Daerah agar memastikan pelaporan Kegiatan Pengendalian Inflasi
Triwulan III dilaksanakan tepat waktu.
6. Kepada Kepala Dinas Perhubungan agar menugaskan personil untuk ditempatkan di tempat-tempat strategis seperti di sekitar Pasar Induk Caringin dan Gedebage untuk menjamin kelancaran arus barang kebutuhan pangan pokok strategis.
7. Kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja agar menugaskan personil untuk ditempatkan di tempat-tempat strategis untuk pengamanan aktivitas bongkar muat dan distribusi barang kebutuhan
pangan pokok.